

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN ZAKAT  
DALAM BENTUK UPAH HASIL PANEN PADI**  
(Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten  
Lampung Barat)

**SKRIPSI**

**RIAN RIZOMI**  
**NPM 1721030368**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag  
Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1442 H/2021 M**

## ABSTRAK

Upah mengupah merupakan bentuk tolong menolong antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yakni dengan cara memanfaatkan tenaga. Dalam Praktek pengupahannya yang diberikan bukanlah berbentuk uang melainkan dalam bentuk hasil panen padi yang tidak menentu jumlah dan harganya tergantung musim panen. upah yang diberikan besarnya adalah dua dari setiap setiap duabelas kaleng yang di hasilkan oleh pekerja, sehingga besaran upah yang diterima para pekerja tidak menentu tergantung dari berapa banyak jumlah padi yang berhasil pekerja panen. Selain upah petani juga menambahkan berupa zakat terhadap para pekerja. Padahal zakat sudah jelas di tentukan dalam pendistribusian dan proses pengupahan yang diberikan sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik padi dengan pekerja. Dengan demikian dilihat dari timbulnya permasalahan tersebut dianggap perlu untuk dilakukan penelitian serta ditinjau pada hukum Islam terhadap pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi dikhawatirkan akan ketidakpatian dalam pendistribusian zakat dapat mengurangi bagian dari golongan yang lebih membutuhkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, wawancara, dokumnetasi. Penelitian ini merupakan Penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa upah/bayaran yang diberikan kepada buruh tani dalam praktek bawon ini sebesar 2/12 (duabelasperdua) dari seluruh hasil padi yang sudah dipanen. Upah tersebut belum pasti berapa jumlah yang akan diterima, karena jumlahnya menyesuaikan dengan padi yang telah dipanen nantinya. Selain dari upah pokok bawon yang berjumlah 2/12

(duaperduabelas) dari hasil panennya, terdapat upah tambahan yang diberikan petani dan diniatkan sebagai zakat petani belum sesuai masih menggunakan aturan mereka sendiri. Sedangkan praktek akad pengupahan buruh tani (bawon) di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ini, menggunakan akad ijarah (sewa) yang mana dikategorikan sebagai ijarah al-A‘mal yaitu sewa manfaat jasa seseorang. Namun, dalam hal ini terdapat pemberian tambahan pemberian upah yang diniatkan sebagai zakat oleh petani (mu‘jir), yang mana pemberian zakat ini sudah masuk dalam ketentuan kewajiban zakat hanya saja mereka dalam mengeluarkan zakatnya menggunakan aturan sendiri tanpa menetapkan hukum Islam. Ini berarti bahwa praktik zakat yang selama ini berlaku di desa tersebut tidak sah untuk disebut zakat melainkan hanya sedekah biasa.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Rizomi  
Npm : 1721030368  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi** (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Maret 2021  
Penulis,



**Rian Rizomi**  
**NPM. 1721030368**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG**  
Skripsi : **PEMBERIAN ZAKAT DALAM BENTUK UPAH**  
**HASIL PANEN PADI (Studi Di Desa Kerang**  
**Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**  
Nama : **Rian Rizomi**  
NPM : **1721030368**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Jurusan : **Muamalah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag**

**Muslim, M.H.I**

**NIP.197504282007101003**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh **Rian Rizomi Npm 1721030368** Program Studi **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag**

**Penguji I : Drs. Henry Iwansah, M.A**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag**

**Penguji III: Muslim, M.H.I**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M. H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(Qs. Al-baqarah :267)

## **RIWAYAT HIDUP**

Rian Rizomi lahir Liwa di pada tanggal 07 Oktober 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Thanthowi Usman dan Ibu Sumsidar.

Riwayat pendidikannya Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Liwa pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Liwa pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 2 Liwa pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 19 Maret 2021  
Penulis,

**Rian Rizomi**  
**NPM. 1721030368**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur *alhamdulillah rabbil'alamin* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Bapak Dr.H. Khairuddin Tahmid, M.H. beserta jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua program studi Muamalah Bapak Khairuddin, M.S.I dan sekretaris jurusan Muamalah Ibu Juhrotul Khulwah, S.H, M.H. yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag, dan pembimbing II bapak Muslim, M.H.I, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala desa kerang serta masyarakat desa kerang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini;

7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain.
8. Sahabat Aldi Dwi Pranata, Devi Oktavia Mahmud Farizi, , Ramadhani, Syahril Sobirin, Wahyudi Azmi, Welly Fitriyana, Yosep Depta.
9. Sahabat KKN Dirka, Irfan, Serni, Angga, Sapriyansah, Anis Leha dan semua temen-temen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih semangatnya.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini terkhusus jurusan Muamalah angkatan 2017 terutama kelas D yang saya banggakan.
11. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan Kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu- ilmu di bidang Keislaman.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 19 Maret 2021  
Penulis,

**Rian Rizomi**  
**NPM. 1721030368**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Landasan Teori .....	9
I. Metode Penelitian .....	10
J. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Deskripsi Umum Tentang Zakat .....	17
1. Pengertian Zakat .....	17
2. Landasan Hukum .....	20
3. Rukun Zakat .....	22
4. Syarat-syarat Zakat .....	23
5. Jenis-jenis Zakat .....	24
6. Benda yang wajib Dizakati .....	26
7. Nishab .....	33
8. Cara Menghitung Nishab .....	34



9. Orang- orang yang Berhak Menerima Zakat .....	35
10. Tujuan dan Fungsi zakat.....	36
B. Deskripsi Umum Tentang Upah .....	38
1. Pengertian Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	38
2. Dasar Hukum Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	41
3. Syarat dan Rukun upah ( <i>Ijarah</i> ) .....	46
4. Macam-macam dan bentuk Upah ( <i>Ijarah</i> ).....	52
5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah .....	55
6. Pembayaran Upah dan Sewa .....	58
7. Berakhirnya Akad Ijarah .....	59

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dasar Kerang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat .....	61
1. Keadaan Geografis.....	61
2. Keadaan Demografis.....	61
B. Sistem Pemberian Upah dan Zakat Pada Hasil Panen Padi.....	65
1. Sistem pemberian Upah .....	65
2. Sistem Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Praktik Pemberian Upah dan Zakat Di Desa kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat .....	73
B. Temuan Penelitian .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi .....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk .....	75
Tabel 2.1 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera ...	75
Tabel 3.1 Jumlah Peserta.....	76
Tabel 4.1 Kondisi Pemukiman .....	76
Tabel 5.1 Tempat Ibadah.....	76
Tabel 6.1 Lembaga Pemerintahan .....	77
Tabel 7.1 Pembagian Wilayah.....	77
Tabel 8.1 Konversi Satuan Pada Praktik Pembayaran Zakat .....	81



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Upah Hasil Panen Padi (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat)**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

Tinjauan adalah meninjau, pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan Hukum Islam pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazimnya diartikan agama adalah spritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengartian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.<sup>2</sup> Jadi hukum Islam adalah seperangkat pengaturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah di tetapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.951

<sup>2</sup>R.J.Akyuwen,SH.M.Hum, *Buku Ajar Hukum Islam*(Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017), h.3

<sup>3</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1978) h.346



Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ujran* yang berarti memberi hadiah/upah, dalam pengertian *syara'* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Panen padi adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman padi yang mempertandakan menandai berakhirnya kegiatan di sebuah lahan.

Desa Kerang adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan batu brak kabupaten lampung barat sebagai objek penelitian karna ingin mengetahui bagaimana pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi di desa tersebut.

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Upah Hasil Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat).

## **B. Latar Belakang**

Di masa ini kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya jika manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan perannya kepada orang lain, saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Setiap manusia tidak bisa hidup sendirian dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, karena itu manusia perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya yang setiap hari semakin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam ada untuk mengatur keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.

Ada banyak kegiatan manusia yang telah diatur oleh agama, salah satunya adalah zakat. Zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang di tunjukan nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, persentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali untuk dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan kekayaannya. Berdasarkan Firman Allah SWT, Surah At-Taubah, ayat 103 berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah (9): 103).<sup>4</sup>*

Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang di hitung tidak mengurangi kewajiban dalam pengeluarannya.

Selain persoalan zakat bentuk lain dalam bermuamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut pemilik lahan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah adalah hak pekerja yang

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Magfirah Pustaka,2006) h. 203

diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, Pembayaran dapat dihitung berdasarkan setiap tugas yang terselesaikan (upah borongan atau hitungan jam). Hal ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah Al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>5</sup>

Adapun alasan penulis memilih judul ini yaitu praktek pengupahannya yang diberikan bukanlah berbentuk uang melainkan dalam bentuk hasil panen padi yang tidak menentu jumlah dan harganya tergantung musim panen. upah yang diberikan besarnya adalah dua dari setiap setiap duabelas kaleng yang dihasilkan oleh pekerja, sehingga besaran upah yang diterima para pekerja tidak menentu tergantung dari berapa banyak jumlah padi yang berhasil pekerja panen. Selain upah petani juga menambahkan berupa zakat terhadap para pekerja. Padahal zakat sudah jelas ditentukan dalam pendistribusian dan proses pengupahan yang diberikan sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik padi dengan pekerja. Dengan demikian dilihat dari timbulnya permasalahan tersebut dianggap perlu untuk dilakukan penelitian serta ditinjau pada hukum Islam terhadap pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi dikhawatirkan akan ketidakpatian dalam pendistribusian zakat dapat mengurangi bagian dari golongan yang lebih membutuhkan.

Mengenai permasalahan tersebut, banyak tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian serta sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari penulis di bidang Mumalah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta banyaknya teori dan literatur yang mempermudah dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan pengamatan langsung, mayoritas masyarakat desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat adalah petani padi dan kopi. Namun tertarik untuk membahas terhadap petani padi di mana masyarakat desa sebarus menggunakan jasa buruh dalam memanen padi.

---

<sup>5</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h.215



Buruh panen di Desa Kerang tidak mempunyai struktur organisasi. Biasanya buruh panen di pilih langsung oleh pemilik sawah yang akan memanen padi. Selain itu, ada juga pihak pemilik sawah meminta bantuan kepada orang yang biasa menjadi buruh panen.

Sistem pengupahannya yaitu dari setiap dua belas kaleng padi yang di panen maka pekerja mendapat dua kaleng padi. Sistem ini berlaku untuk semua pekerja baik hanya satu orang, dua orang atau lebih. Selain upah, petani memberikan tambahan berupa zakat terhadap para pekerja yang telah membantu memanen padi. Pemberian zakat tersebut dilakukan apabila hasil panen melimpah ruah dan untuk menunaikan kewajiban zakat setelah panen.

Hal ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Kerang dalam mengeluarkan zakat panen padi dan sekaligus upah yang langsung diberikan kepada buruh panen setelah selesai memanen padi milik *muzaki*. Praktik tersebut dikhawatirkan akan ketidakpastian dalam pendistribusian zakat dapat mengurangi bagian dari golongan yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin.

Zakat dan upah kedua hal yang berbeda sehingga tidak dapat digabungkan dalam pelaksanaannya. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu saat tercapai nishabnya, sedangkan upah adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

Namun terjadi sebuah fenomena di masyarakat adanya pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi, dengan demikian perlu untuk diteliti serta menganalisis dalam perspektif hukum Islam tentang pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi tersebut dan menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Kasus di Desa Di Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi Di Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam proposal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji Pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
2. Mengkaji pandangan hukum Islam tentang pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga

proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Pertama, skripsi Alisa Sartika (2017) yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)” Dari penelitian saudara Alisa Sartika menunjukkan:

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Tanjung Anom adalah menggunakan sistem pemberian upah yang diberikan setelah panen. Sistem ini menjadi kebiasaan di desa Tanjung Anom. Karena semua orang punya sawah memakai sistem ini, yaitu menyuruh orang untuk menanam padinya, dan orang yang punya sawah memikirkan beberapa orang yang di butuhkan untuk menanam sawahnya. Dengan sawah seluas satu hektar hampir 20 orang buruh tani. Tetapi orang yang disuruh menanam padi itu tidak diberi upah secara langsung dan tidak ada ketentuan yang dipastikan berapa upah yang akan mereka terima. Mereka baru mengetahui berapa upahnya setelah mereka ikut panen nanti. Padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padi nantinya dan berapa hasil yang mereka dapatkan.<sup>6</sup>

Kedua, skripsi Lahuda (2017) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi ( Studi Kasus

---

<sup>6</sup> Alisa Sartika, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

Desa Semuntul Kecamatan Bayur Kabupaten Banyuasin)<sup>7</sup>. Dari penelitian saudara Lahuda menunjukan :

Sistem upah buruh panen di desa pagar dewa adalah 9:1 petani mendapatkan 8 kaleng gabah maka 1 kalengnya upah buruh. Praktek sistem pengupahan berdasarkan adat (kebiasaan) masyarakat setempat, telah berlangsung lama dan keberadaanya tetap di pertahankan oleh masyarakat setempat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah sesuai dan seimbang (adil). Hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam keadaan tertentu masyarakat desa Sumuntul membayar upah buruh dengan uang berdasarkan kesepakatan.

Ketiga, Novi Wulandari (2016) yang berjudul “Sistem Pengupahan Ekonomi Islam Dan Relevansi Dengan Sistem Pengupahan Indonesia” penelitian saudara Novi Wulandari menunjukan:

Relevansi dengan Sistem pengupahan ekonomi Islam dan sistem pengupahan Indonesia sangat berkaitan diantara keduanya karena sama sama meningkatkan keadilan dari pada pekerja/buruh. Hanya saja banyak ditemukan sering terjadi di masyarakat mengenai penetapan upah terkadang belum dijalankan sesuai peraturan yang telah dibuat.<sup>8</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi pengupahan, meskipun pada dasarnya judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama , namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena di sini penulis akan membahas sistem pengupahan dengan sistem bawon yang terjadi akad *Ijrah Al-A'mal* (sewa mamfaat jasa) yang di dalamnya juga terdapat pemberian zakat dari petani terhadap buruh tani. Dalam hal

---

<sup>7</sup> Lahuda “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Bayur Kabupaten Banyuasin), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, (Palembang : UIN Raden Fatah,2017)

<sup>8</sup> Novi Wulandari “Sistem Pengupahan Ekonomi Islam Dan Relevansi Dengan Sistem Pengupahan Indonesia”), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2016).

ini pengeluaran zakat tersebut tidak diketahui oleh para buruh tani bahwa tambahan pemberian tersebut adalah zakat pertanian, melainkan yang mereka ketahui adalah tambahan upah dari mereka bekerja. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pemberian zakat yang mana harus diketahui oleh penerima zakat.

Sedangkan pada dasarnya zakat pertanian yang memang sudah menjadi kewajiban setiap panen yang harus dikeluarkan sebanyak 10% apabila dialiri dengan irigasi dan air hujan, dan 5% untuk sawah yang dialiri dengan alat disel yang dilakukan pada saat penanaman padi sampai siap di panen. Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi penulis dalam menyelesaikan. Oleh karna itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi (Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

## H. Landasan Teori

Dilihat dari judul yang akan diteliti oleh penulis yang berjudul Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi dalam tinjauan hukum Islam maka landasan teori yang menjadi acuan bagi penulis adalah zakat tanaman dan biji-bijian. Penjelasan tentang teori tersebut akan dibahas sebagai berikut :

Salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu zakat tanaman dan biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang di keluar dari tanah atau bumi dengan dengan menamam dan merawat hingga waktu panen. Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2): 267 yang berbunyi<sup>9</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

---

<sup>9</sup>Mushaf Al- Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Jabal, 2010) h.45



وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

*Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

Ayat ini menjelaskan tentang suatu hasil bumi yang keluar dari bumi diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Dalam mengeluarkan zakat harus dengan hasil yang terbaik, bukan yang buruk apalagi yang paling buruk.

Menurut Ibnu Hasan : “waktu wajib zakat dan mengambilnya, ialah sesudah kering pada buah-buahan dan sesudah dibersihkan pada biji-bijian.” Semua biaya dari awal pemetikan tanaman sampai bersih semuanya di tanggung oleh pemilik.

Hal ini dapat dijadikan dasar besarnya dalam mengeluarkan zakat yaitu 10% untuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang diairi oleh hujan, sungai atau mata air, sedangkan 5% untuk tanaman yang diairi dengan biaya sendiri baik menggunakan tenaga maupun sejumlah uang dimiliki.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan masalah. Ada beberapa cara yang digunakan peneliti antara lain :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan mengunjungi langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian oleh penulis.<sup>10</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah Pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen padi di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan peneliti sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi *variable* yang ada kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

---

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), h. 81.

<sup>11</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54-55.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 56.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti , maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan wawancara ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang melakukan pemberian zakat dalam upah panen padi. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sebagai tempat penelitian dan pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun didapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Adapun data sekunder terdiri dari :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu penjelasan terhadap sumber data primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan zakat dan upah yaitu buku fiqh islam lengkap, fiqh zakat, fiqh mumalah.

3) Sumber Data Tersier .

Sumber data tersier yaitu penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal dan sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini baik primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip ilmiah.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya setelah melakukan penelitian.<sup>13</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek peneltian, adapun populasi penelitian ini adalah petani desa Sebarus sebanyak 130 orang yang terdiri dari pemilik sawah yang berjumlah 30 orang dan buruh tani yang berjumlah 100 orang.

#### b. Sample

Sample adalah contoh, moster, representan atau wakil dari populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari keseluruhan yang dipilih, representative sifatnya dari keseluruhan. Untuk menentukan jumlah sample, menggunakan rumus yang di kemukaan oleh Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%.

Untuk menentukan jumlah sample dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *random sampling* yaitu teknik pengambilan sample atau elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sample. Penulis mengambil sample

---

<sup>13</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 40.

10% dari 130 orang yaitu sebanyak 13 orang terdiri dari 10 orang buruh tani dan 3 orang pemilik sawah di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik.<sup>14</sup> Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan orang pemilik sawah, pekerja panen sawah di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

#### **5. Metode Pengolahan Data**

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>16</sup>

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

<sup>16</sup> Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.



- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. *Sistematic* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberian zakat dalam bentuk upah panen padi dalam tinjauan hukum Islam.<sup>17</sup>

Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penel.

## J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, sistematika, pembahasan.

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 157.

Bab kedua berbicara mengenai gambaran umum tentang zakat, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat, landasan hukum, jenis- jenis zakat, benda yang wajib dizakati, nishab, cara mengitung nishab, orang yang berhak menerima zakat, tujuan dan fungsi zakat. Serta gambaran umum tentang upah yang diawali pembahasan pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah, macam-macam dan bentuk upah, upah dalam pekerjaan ibadah, pembayaran upah dan sewa.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan mengenai Pemberian Zakat Dalam Bentuk Upah Hasil Panen Padi Studi Di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, yang meliputi : gambaran keadaan geografis, keadaan demografi, sistem pemberian upah serta sistem pemberian zakat hasil panen padi.

Bab keempat merupakan analisis pelaksanaan system pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen, dan analisis hukum Islam terhadap system pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dari petani dan buruh, yang menjadi objek kajian. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori tentang zakat dan upah secara umum.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam system pemberian zakat dalam bentuk upah hasil panen di Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti *nama* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkahan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = menyucikan. Syara' berasal dari kata tersebut untuk kedua arti ini.

*Pertama*, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu”, dengan zakat. *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Bentuk- bentuk pengertian zakat menurut para ahli :

- a. *Abu Muhammad ibnu Qutaibah* menyatakan, bahwa : “lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama “ kesuburan dan penambah”. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.
- b. *Abu Hasan Al Wahidi* mengatakan bahwa zakat menyucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.
- c. *Abu muhammad ibnu Qutaibah* mengatakan bahwa : “lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama' = kesuburan dan penambahan”.<sup>1</sup>

Zakat menurut syara' yaitu :

- a. *Al Mawardi* dalam seseorang *Al Hawi* berkata, zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu harta yang tertentu,

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.3-4

menurut sifat-sifat yang Tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

- b. Asy Syaukani berkata, “Memberi suatu bagian harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan halangan syara’ yang tidak membolehkan seseorang memberikan kepadanya”.
- c. Az Zarqani dalam syarah *Al Muwaththa’* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syarat ialah sebab, cukupnya setahun dimiliki. Zakat ditetapkan kepada orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotor.

Zakat ini mempunyai berapa istilah:

- a. Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Al-Baqarah (2) : 43).

- b. Shadaqah (Sedekah)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ

الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya : *Apakah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hambanya dan mengambil shadaqah-shadaqah dan bahwasanya Allah sangat menerima taubat hambanya senantiasa kekal rahmatnya.* (Q.S At-Taubah (9) : 104).

c. Haq

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al- an'am (6) : 141)

d. Nafaqah

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتَنُبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَٰذَابٍ أَلِيمٌ ﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S At-Taubah (9) : 34)

e. 'Afuw



خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Ambillah 'afuw (zakat) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang jahil (tidak beradab). (Q.S Al-A'raf (7): 199).*

## 2. Landasan Hukum

### a. Nash Al-Qur'an

Al-Qur'an dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi pokok pembelajaran Islam bahkan Al-Qur'an dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran agama Islam, hal ini dapat dilihat dalam Al- Qur'an surah At-Taubah : 11 sebagai berikut :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.<sup>2</sup>*

Perintah zakat yang di turunkan pada periode mekh, sebagaimana yang terdapat pada, merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk *amr* (perintah) dengan menggunakan kata “atau” (tunaikan) yang bermakna ketetapan, segera, sempurna sampai akhir, kemudahan mengantarkan zakat itu kepada golongan yang membutuhkan.

### b. Nash As-Sunnah

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006) h.188

As-sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berkaitan dengan zakat adalah :

بُنِيَ لِإِسْلَامٍ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya :“....bahwa Islam itu dibina di atas lima asas, mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan melakukan haji bagi siapa yang sanggup mengerjakannya.” (HR. Bukhari)<sup>3</sup>

Hadist tersebut adalah bagian dari nash As-Sunnah yang bersifat umum yang menegaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat firah. Sedangkan pada hadist yang lainnya menjelaskan sub-sub masalah zakat, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, delapan ashab dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

#### c. Landasan Ijma'

Adapun landasan zakat dari ijma' yaitu Nabi Muhammad SAW wafat, maka pimpinan pemerintah di pegang oleh Abu Bakar Assiddiq, sebagai khalifah pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penetapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkatgorikan mereka sebagai orang murtad.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Al-Bukhari, Abu Abdullah Bin Al-Mughirah Bin Al-Bardzibat, *Shahih Bukhari*, Jilid I, (Beiry : Dar Al-Fikr,1992), h.7-8

<sup>4</sup>Imam Al-Suyuthi, Trikh Khulafah, Diterjemahkan oleh Samsul Rahman, dengan Judul “*Sejarah Penguasa Islam*” (cet I : Jakarta: Al-kausar, 2001), h.79

Seterusnya pada masa tabiin dan imam mujahidin serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola oprasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

d. Fatwa MUI Tentang Zakat

Fatwa ulama tentang pelaksanaan zakat tahun 1982, yaitu :

- 1) Penghasilan dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul.
- 2) Yang berhak menerima zakat hanya delapan *Ashnaf* yang tersebut dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.
- 3) Untuk kepentingan dan kemashlahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infaq* atau *shadaqah*.
- 4) *Infaq* dan *shadaqah* yang diatur pengutannya oleh *Ulil Amri*, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

### 3. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah jatuh nishab (syarat jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya) dan haulnya (batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), ada serah terima antara pemberi zakat dan penerima zakat dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi secara sederhana rukun zakat sebagai berikut :

- a. Niat untuk menunaikan zakat yang haus dilandasi rasa ikhlas semata- mata karena Allah SWT.
- b. Pemberi Zakat (*muzaki*)

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membeyar zakat atas kepemilikan harta yang mencapai nishab dan haul. Kreteria muzaki menurut hadist adalah beragama Islam, merdeka, harta yang dimiliki secara sempurna.

- c. Penerima zakat (*mustahik*)

*Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Kreteria *Mustahik tercantum* dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. At-Taubah (9) : 60)

- d. Adanya harta yang dizakatkan yang meliputi hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan dan sebagainya.

#### **4. Syarat-Syarat Zakat**

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditemukan secara syara'. Wahbah Al-Zuhaili membagi syarat zakat menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Adapun zakat wajib zakat adalah :

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan berakal.
- d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.
- e. Harta tersebut mencapai nishab (ukuran jumlah).
- f. Harta tersebut adalah milik penuh.
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu).
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi ukuran dasar dan pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara ayang baik dan halal.

k. Berkembang.<sup>5</sup>

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa ada syarat melainkan ada hak orang lain di setiap harta yang berkembang.

## 5. Jenis-jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yaitu :

a. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang *Idul fitri* pada bulan *Ramadhan*. Besar zakat ini setara dengan dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kamimat yang membentuknya terdiri kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama<sup>5</sup> bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab* dan *haul*) yang diperuntukan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk di berikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana Hadist Rasul “*kullu mauludin yaladu ala al fitrah*” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan juga bisa diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik dua kesimpulan tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah

---

<sup>5</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,1997), h.100.



adalah zakat untuk menyucikan. Artinya zakat yang dikeluarkan menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S At-Taubah : 103)

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau sebelum hari raya Idul Fitri. “Dari Ibnu ‘ Abbas r.a berkata : Rasulullah SAW, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan yang sia-sia dan omongan-omongan kotor dari orang yang berpuasa dan sebagian makanan bagi orang yang miskin maka barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, dan di sahkan oleh Hakim).

Yang wajib dizakati :

- 1) Untuk dirinya sendiri; tua, muda, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya.

“Dari Ibnu Umar ra, berkata ia telah bersabda Rasulullah SAW : Bayarlah zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” (HR. Daruquthni dan Baihaqi).

Untuk zakat fitrah dari seseorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan jagung, walaupun jagung termasuk makanan

pokok tetapi, jagung nilainya rendah daripada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan keawajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukan karena keberadaan harta.<sup>6</sup>

#### b. Zakat Mal

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan, masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.<sup>7</sup>

### 6. Benda yang Wajib Dizakati

#### a. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing, dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: Diberitahukan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi SAW, bersabda sebagai berikut : “Seorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi, atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar dari pada di dunia, lalu hewan-hewan menginjak-injak pemilik dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula, dan demikianlah itu terus menrus sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia.” (HR. Bukhari).

Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah :

---

<sup>6</sup>Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978), h.348

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h-9

- 1) Islam
- 2) Merdeka. Seorang hamba yang tidak wajib berzakat.
- 3) Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup satu nishab.
- 5) Sampai satu tahun dipunyai
- 6) Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan ( diambilkan makanannya) tidak wajib dizakati.

Seseorang yang memiliki 5 ekor ke atas wajib mengeluarkan zakatnya dengan aturan sebagai berikut :

- 1). Unta
  - a) 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
  - b) 10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
  - c) 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
  - d) 20-24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
  - e) 25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun
  - f) 36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun
  - g) 46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun
  - h) 61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun
  - i) 76-90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun
  - j) 91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun
  - k) 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun

Kemudian untuk tiap tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 2-3 tahun dan untuk tiap tiap 50 ekor unta 1 ekor unta berumur 3-4 tahun.<sup>8</sup>

- 2) Zakat sapi atau kerbau

---

<sup>8</sup>Achmad Sunarto, *Risalah Puasa, Zakat & Haji*, (Surabaya : Amanah,2002), h.36-37.

Nishab sapi atau kerbau ialah mulai 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut :

- a) 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1-2 tahun.
- b) 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun.
- c) Untuk selanjutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun.

### 3) Zakat kambing

Nishab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun. Selanjutnya di atur sebagai berikut :

- a) 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- b) 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- c) 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun
- d) 301-400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing.
- e) 401-500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing.

Dan seterusnya setiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.<sup>9</sup>

### b. Emas dan Perak

Nishab emas adalah *mitsqal* atau sama dengan ( kurang lebih 96 gram, zakatnya 2,5%. Adapun perak nishabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram, zakatnya 2,5%. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran nishab dan haul (satu tahun), berwajiblah bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Dengan demikian juga jika kepemilikannya benda itu berlebihan, pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus dibayarkan. Misalnya, jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5%

---

<sup>9</sup>Moh.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978), h.356

dikalikan dengan 100 gram=2,5 gram. Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau bagian dari emas tersebut, melainkan nilai uang setara dengan jumlah emas yang harus dikeluarkan.<sup>10</sup> Zakat emas dan perak wajib di keluarkan berdasarkan firman Allah :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya : "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S At- Taubah : 34-35)

Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian : pendapat Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya

<sup>10</sup>Ibid, h. 351

pula. Pendapat Imam Malik : jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan laki untuk dipakai istrinya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian jika seorang lelaki memilikinya untuk disimpan atau untuk pembekelan dimana perlu, wajiblah dikeluarkan zakatnya.

Syarat- syarat wajib zakat emas dan perak :

- 1) Milik orang Islam
- 2) Yang memiliki adalah orang yang merdeka
- 3) Milik penuh ( dimiliki dan menjadi hak penuh)
- 4) Sampai nishabnya
- 5) Sampai sat tahun disimpan

c. Zakat Hasil Bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti : padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: anggur, dan kurma. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

“Tidak ada sedekah ( zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai lima *wasaq* (653kg). (HR. Muslim)

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebai berikut :

- a) Pemiliknya orang Islam
- b) Pemiliknya orang yang merdeka
- c) Milik sendiri
- d) Sampai nisabnya
- e) Makanan itu ditanam oleh manusia
- f) Makanan itu menyegarkan dan tahan lama untuk di simpan

Tidak disyaratkan setahun memiliki, tetapi wajib di keluarkan zakatnya pada tiap-tiap menuai panen.

d. Nishab dan zakat hasil bumi



Nishab dan zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda Nabi : “ Dari Abdullah r.a Nabi SAW bersabda : “Tanam-tanaman yang diairi dengan air hujan atau yang tumbuh di rawa, zakatnya sepersepuluh (1/10) dan diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh (1/20).” (HR. Bukhari)

Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan. Buah-buahan seperti kurma, biji-bijian seperti padi, gandum, dan semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishab nya. Zakat buah-buahan dan biji-bijian tidak perlu haul ( satu tahun), tetapi di keluarkan pada waktu panen. adapun nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima *wasaq*. 1 *wasaq*= 60 *sha'*, sehingga 5 *wasaq*=300 *sha'*. 1 *sha'* 2.176 kg, sehingga 300 *sha'*= 652,8 kg atau Kurang lebih 653 kg . Adapun besaran zakat yang dikeluarkan ialah berkisaran antara 5 s.d 10% dan jika produk menyangkut biaya transfortasi, mesin pompa air maka wajib dizakatinya 5%.<sup>11</sup>

#### e. Hasil tambang

Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi nishab sebgaimana emas dan perak, maka harus di keluarkan zakatnya seketika itu juga, tidak perlu menunggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5%. Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau logam lainnya yang berharga.

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz :

- 1) Orang Islam
- 2) Orang merdeka
- 3) Milik sendiri
- 4) Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishabnya zakat barang tambang dan barang temuan,, dengan emas dan perak yakni 20 mitsqa 1= 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2,5%.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, h.356-359.

<sup>12</sup>Ibid,h.359

## f. Harta perniagaan

Barang (harta) perniagaan wajib di keluarkan zkatnya mengingat firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)*

Adapun sabda Rasulullah “ Dari Sumarah : Rasulullah Saw, memerintahkan kami agar mengekuarkan zakat dari barang yang disediakan untuk di jual” ( HR. Daruquthni dan Abu Daud)

Syarat-syarat wajibnya zakat perniagaan ialah :

- 1) Yang memiliki orang Islam
- 2) Yang memilki orang merdeka

- 3) Milik penuh
- 4) Sampai nishabnya
- 5) Genap setahun

Setiap tahun perdagangan harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5%.

Harta dagangan yang mencapai seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Kalau sekiranya emas 1 gram Rp 100, maka barang dagangan yang seharga  $96 \times \text{Rp } 100 = \text{Rp. } 9600$ , wajib dikeluarkan zakatnya  $2,5\% = \text{Rp. } 240$ .<sup>13</sup>

Harta benda perdagangan perseroan, firma, CV, atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.

Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, alat-alat penampung air maupun barang-barang dagangan lainnya. Adapun bangunan yang disewakan maka kewajiban zakat ada pada uang sewa (jika mencapai nishab) dan telah setahun kepemilikan.

Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang disewakan tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak dipersiapkan untuk dijual tetapi untuk digunakan. Akan tetapi jika uang hasil disewaannya mobil tersebut atau apapun yang telah mencapai nishab dan telah lewat setahun dalam kepemilikan seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik uang tersebut dipersiapkan untuk nafkah, untuk menikah, untuk dibelikan perabot rumah, atau untuk dibayarkan hutang maupun untuk lainnya.

## 7. Nishab

Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'I (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran

---

<sup>13</sup>Ibid, h.352-353.

tersebut. Orang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut :

- 1) Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
- 2) Harta yang dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil hadist Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. “*Tidak ada zakat atas harta, kecuali telah sampai satu haul (satu tahun).*” (HR. Tirmizi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh Al-Bani) dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah buahan diambil ketika panen. demikian juga zakat harta karun (rikaz) yang diambil ketika menemukannya.

Misalnya, jika seorang menjadi memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan zakat karena nishab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka seseorang mulai menghitung setahun setelah sempurna nishab tersebut.

## 8. Cara Menghitung Nishab

Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada masalah, apakah dilihat dari nishab dari selama satu tahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhirnya saja?

Imam Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami (Syafi’i), mazhab Malik, Ahmad, dan Jamhur, adalah disyaratkan pada harta yang wajib di keluarkan zakatnya dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, seperti : emas, perak, dan binatang ternak keberadaan nishabnya pada semua haul (selama setahun) sehingga, kalau nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka tepuslah hitungan haul. Jika sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna tersebut.” (Dikutip dari Sayyid Sabiq dari ucapannya dalam *Fiqh As-Sunnah* 1/468).

## 9. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Mereka terdiri atas delapan golongan. Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam seseorang-Nya yang mulia tentang golongan-golongan penerima zakat dalam Firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Arinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah : 60)<sup>14</sup>

### a. Yang berhak menerima zakat

- 1) Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari.
- 2) Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi.
- 3) Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi- bagikannya kepada yang berhak menerima sesuai dengan hukum Islam.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006) h.196

- 4) Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya.
  - 5) Hamba sahaya yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan di merdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
  - 6) *Gamirin* yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya.
  - 7) *Sabilillah* yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
  - 8) *Mushafir* yaitu orang yang kekurangan pembekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.
- b. Yang tidak berhak menerima zakat
- 1) Orang kaya, Rasulullah bersabda, “tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.” (HR. Bukhari)
  - 2) Hamba sahaya, karena masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya.
  - 3) Keturunan Rasulullah, Rasulullah bersabda, “sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).” (HR. Muslim)
  - 4) Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.
  - 5) Orang kafir.

## 10. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat adalah salah satu kewajiban orang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di mana zakat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping itu juga dapat membersihkan jiwa dan sifat kikir dan pelit sekaligus



merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah SWT. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam golongan.

Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peran penting, strategi dan menentukan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat itu:<sup>16</sup>

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan syukur harta dan nikmat itu akan menjadi berlipat ganda.
2. Melaksanakan penanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari andil dan bantuan orang lain baik langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah, terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagai tindak kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat.

---

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, PT. Pustaka Litera Antarnusa :1996) Cat.4 h. 235

<sup>16</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha Dan Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Persada 1998) h.83

## B. Deskripsi Umum Upah

### 1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.<sup>17</sup> Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>18</sup>

*Ijarah* adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.<sup>19</sup> Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (PT Alma'arif, Bandung, 1987).h.15

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta, Gema Insani 2011). h.387

<sup>19</sup>M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Logung Pustaka, Yogyakarta), h.180

diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian seseorang. Melalui akad ini seseorang bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha seseorang dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan seseorang tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002). h.114

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqih*.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ  
وَإِلَّا بِأَحَدٍ بَعْوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِكُكَ مَنَّا فِعْ شَيْءٍ مَّبَاحٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بَعْوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk

---

<sup>21</sup>Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006). h.39

diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, As- sunnah, dan ijma.

a. Al-Qur'an Surat Al-Qashsh ayat 26-27 disebutkan :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَجْرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ  
الْقَوَىٰ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ  
هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.115

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada seseorang), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada seseorang) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". ( Q.S Al-Qashsh ayat 26-27)<sup>23</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَابْنٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, CV As-syifa, 2001) h.368



بَوْلَدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ق</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ق</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا<sup>ق</sup>  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup>  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,  
 maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  
 pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada  
 Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang  
 kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah ayat 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah  
 kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan  
 dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian  
 menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita  
 yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian  
 harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah  
 diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja  
 hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan  
 jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah  
 pihak.

c. Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً  
 طَيِّبَةً<sup>ط</sup> وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl: 97).*<sup>24</sup>

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

d. As-Sunnah

Di samping ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa Hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

*“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upahnya kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).*<sup>25</sup>

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

<sup>24</sup>Ibid, h. 278

<sup>25</sup>Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995). h. 361

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazag).

Sabda Rasulullah :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ :  
إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ  
صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ أَبُو بَخَارٍ

Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mmengatakan: "Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha' makanan.

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ  
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرُوا رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ  
اسْتَأْجَرَ جِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.<sup>١٩</sup>

Artinya :Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya." (HR Muslim)

#### e. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat

mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ibnu Rusyd dalam seseorang Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### 3. Rukun Upah dan Syarat (*Ijarah*)

#### a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>26</sup>

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa- menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

---

<sup>26</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007). h. 303

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa- menyewa ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqil adalah orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*.<sup>27</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam Hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil

---

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007). h. 95

uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>28</sup>

b. Syarat *Ijarah*

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa- menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Pelaku *Ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan

---

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 231

<sup>29</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h.186



orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *Al-Ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

## 2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukannya dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

3) Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

4) Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan :

لَا سِتْجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Artinya: "Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh".

5) Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

## 2) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

## 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

## 4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

## 5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu :

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- 2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- 3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- 4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- 5) Kemanfataannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun as- Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan

*mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

#### 4. Macam-macam dan Bentuk Upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda- benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.

Selain pembagian *ijarah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *ijarah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *ijarah* ini terdapat dalam mazhab Syafi'i, adapun pembagian *ijarah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

1. *Ijarah 'Ain*, adalah *ijarah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *ijarah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ijarah* ini oleh mazhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
2. *Ijarah immah*, adalah *ijarah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diadakan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (*salam*). Yang harus diperhatikan dalam *ijarah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

Adapun pada awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu'amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

#### 1) Upah mengarjakan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

#### 2) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut,

kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah).

### 3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

### 4) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, tau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

### 5) Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا

أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 233)

## 6) Perburuhan

Selain sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### 5. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an diperselisiskan kebolehan oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, adzan, qomat, dan menjadi imam hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut Rasulullah SAW, bersabda :

“Bacalah olehmu Al-Qur'an dan janganlah kamu (cari) makan dengan jalan itu, dan jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'adzin, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah”.

Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an dan dzikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.



Hal ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, apabila seseorang salah satu muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal (keluarga) memerintah kepada para santri atau yng lainnya yang pandai baca Al-Qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Al-Qur'an pada waktu yang ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasa tersebut.

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembacaan Al-Qur'an niat karna Allah, maka pahala pembaca ayat Al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ  
 عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا  
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Al-Baqarah : 286)

Dijelaskan oleh sayyid sabiq dalam seseorangnya *Fiqh sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an Guru-guru sekolah dan yang lainnya diperbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat metea tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertai dan yang lainnya dan waktu tersita untuk mengajar Al-Qur'an.

Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah pekerja adzan, qomat, mengajar Al-Qur'an fiqh, hadist, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajar Al-Qur'an, Hadist, fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk *taqarrub* seperti membaca Al-Qur'an, Shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan pengajar ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat Al-Qur'an dan mengajarkan bila kaitan pembacaan dan pengajaran dengan taat atau ibadah, sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan dan badal haji.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung khat, bahasa, sastra, fiqh, hadist membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.<sup>30</sup>

## 6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewaiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai manfaat yang di terimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarnya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, berladan kepada yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda “*Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering*” (HR. Ibnu Majah)
- b. Jika menyewa barang, uang sewaan di bayar ketika akad sewa kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>31</sup>

## 7. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad ijarah dapat berakhir karena hal-hal berikut ini :

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang akad, ini menurut pendapat Hanifah. Sedangkan menurut jamhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang di sewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.

---

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.118-121

<sup>31</sup>*Ibid.* h.121

- b. Iqalah, yaitu pembatalan oleh kedua elah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *Ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa di panen. Dalam hal *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2017). h.338

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *zakat dalam dimensi mahdha dan sosial*, Jakarta : PT. Raja Persada 1998.
- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, Bandung : Simbiosis Rakatama Media, 2019.
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Jakarta, Pustaka Amani. 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas- asas Hukum Muamalat* , edisi revisi ,Yogyakarta :UII Press, 2000
- Alisa Sartika,“*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani setelah Panen (Studi Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)*”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung: UIN Raden Intan,2017
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshori, Ghofur Abdul, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta :Pilar Media,2006.
- Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008.
- Daud Ali, M. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka,2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV As- syifa, 2001.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Ghafindo Persada, 2016.

Hujrman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018.

Imam Al-Suyuthi, Trikh Khulafah, Diterjemahkan oleh Samsul Rahman, dengan Judul “*Sejarah Penguasa Islam*” cet I : Jakarta: Al-kausar, 2001.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mundur Maju, 1996.

Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006.

Lahuda “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Bayur Kabupaten Banyuasin), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, 2003.

M. Attollah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Bandung : Yrama Widya, 2014.

Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978.

Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Munzir Qahaaf, *Menagemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Khalifa, 2005.

Mushaf Al- Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Jabal, 2010.

Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Novi Wulandari “Sistem Pengupahan Ekonomi Islam Dan Relevansi Dengan Sistem Pengupahan Indonesia”), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, (Bengkulu : IAIN

- Bengkulu, 2016).M. Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta,2006
- Qodariah Barkah, Saprida Dkk, *Fikih zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta : Prenadamedia, 2020.
- R.J.Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar
- Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* , Bandung : Pustaka Setia,2001.
- Suhrawardi K.Lubis Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Pres,1999.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Suatu Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta,1991.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*,Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra,1997.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor, PT. Pustaka Litera Antarnusa :1996